

DAMPAK LITERASI DIGITAL TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA

Said Amirulkamar

Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Aceh, Indonesia
Contributor Email: said.amirulkamar@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Literasi digital mengacu pada kemampuan untuk menggunakan dan memahami teknologi digital secara efektif. Hal ini sangat penting bagi individu untuk berpartisipasi secara efektif di dunia digital dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak literasi digital terhadap pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif etika. Sumber data diperoleh dari jurnal, website resmi, berita online, media sosial, dan katadata. Teknik analisis menggunakan analisis content. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia sangat erat kaitannya dengan literasi digital. Hal ini dibuktikan melalui empat indikator yang menjadi bagian dari kerangka kerja pengembangan literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Literasi digital dalam pelayanan publik secara signifikan mengubah berbagai aspek dan dari perspektif etika, dengan fokus pada konsekuensi moral dan nilai-nilai yang terkait dengan literasi digital. Literasi digital dapat diukur dengan indikator seperti pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi dalam lingkungan digital. Kemajuan teknologi tidak menciptakan pengaruh digital, dan semua pihak memiliki hak yang sama terhadap layanan digital. Literasi digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan online, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan online.

Kata Kunci: Literasi Digital, Pelayanan publik, Perspektif Etika

Abstract: Digital literacy refers to the ability to use and understand digital technologies effectively. It is essential for individuals to participate effectively in the digital world and contribute to improving the quality of public services. The purpose of the study is to analyze the impact of digital literacy on public services in Indonesia from an ethical perspective. Data sources were obtained from journals, official websites, online news, social media, and katadata. The analysis technique used content analysis. The results showed that public services in Indonesia are closely related to digital literacy. This is evidenced by four indicators that are part of the digital literacy development framework, namely digital skills, digital ethics, digital safety, and digital culture. Digital literacy in public services significantly changes various aspects and from an ethical perspective, focusing on the moral consequences and values associated with digital literacy. Digital literacy can be measured by indicators such as knowledge, skills and participation in the digital environment. Technological advancements do not create digital influence, and all parties have equal rights to digital services. Digital literacy can increase people's access to online services, improve the efficiency, accessibility and transparency of online services.

Keywords: Digital Literacy, Public Service, Ethical Perspective.

Article History:

Received; 01-11-2023; Revised; 22-12-2023; Accepted; 10-01-2024

PENDAHULUAN

Literasi digital mengacu pada keterampilan dan pemahaman individu tentang teknologi digital, termasuk kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi secara efektif



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dalam lingkungan digital. Konsep literasi digital melibatkan serangkaian keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif di dunia digital yang terus berkembang (Wahono & Effrisanti, 2018). Penerapan layanan publik berbasis digital secara nasional akan mempercepat peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini akan dicapai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan situs atau aplikasi layanan publik.

Literasi digital mengacu pada kapasitas individu untuk memanfaatkan informasi secara efektif dari berbagai sumber, seperti perangkat komputer atau ponsel. literasi digital sebagai pemanfaatan teknologi secara aktif untuk menemukan, menggunakan, dan mendistribusikan informasi dalam lanskap digital kontemporer. Pelayanan publik mencakup semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan (A.Yudo Triartanto, 2019). Literasi digital dalam pelayanan publik juga menekankan tentang penggunaan digital tetap memperhatikan etika digital, hal ini merupakan keahlian seseorang dalam menyadari, mencontohkan, membiasakan diri, merasionalkan, mempertimbangkan serta mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya media digital mengacu pada kemampuan seseorang dalam memahami, menafsirkan, mengenali, memverifikasi, dan membudayakan pemahaman kebangsaan dan ketaatan pada cita-cita Pancasila dalam kegiatan sehari-hari (Sularsih & Wibisono, 2021). Penggunaan media digital yang aman adalah untuk mengedukasi masyarakat umum tentang keamanan di ranah media digital. Hal ini termasuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya menjaga informasi pribadi, strategi untuk melindungi diri dari informasi yang berlebihan, dan nilai dari mengelola kehadiran digital seseorang. Media digital yang etis mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, membenarkan, menciptakan, mengadaptasi, mengevaluasi, dan meningkatkan prinsip-prinsip etika dalam konteks teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (Mardhiyani, 2020). Budaya merupakan suatu keahlian seseorang dalam membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan. Untuk seseorang yang menggunakan media menjaga data pribadinya dengan melindungi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan bermedia. Tujuan dari kebijakan ini untuk meliterasi publik terhadap keamanan dalam bermedia digital.

Etika digital mengacu pada standar dan prinsip-prinsip etika yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital. Dalam ranah layanan publik, etika digital memiliki arti penting karena potensi dampaknya terhadap kualitas, keterbukaan, dan akuntabilitas layanan yang diberikan kepada publik. Teknologi informasi memfasilitasi akses publik terhadap informasi. Bidang etika digital sangat mementingkan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dalam hal penyebaran informasi publik. Penerapan gagasan ini memfasilitasi pembentukan layanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Meningkatnya pengumpulan dan pengolahan data oleh institusi sektor publik menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait perlindungan privasi. Penekanan pada perlunya penanganan data pribadi secara hati-hati, etika digital memerlukan penggunaan strategi yang aman yang mematuhi undang-undang privasi yang relevan. Teknologi informasi digunakan dalam etika digital untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Layanan publik dapat diformulasikan dengan desain yang memfasilitasi akses yang nyaman dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan layanan publik. Memastikan keamanan informasi merupakan kekhawatiran yang signifikan di era digital saat ini. Memastikan etika digital dalam layanan publik mengharuskan perlindungan data sensitif dan informasi penting dari pihak yang tidak berwenang.

Sistem ini memfasilitasi peningkatan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan layanan publik. Memastikan keamanan informasi merupakan tantangan yang signifikan di era teknologi digital. Pemenuhan etika digital dalam layanan publik mengharuskan adanya perlindungan data sensitif dan informasi penting dari akses yang tidak sah (Akay et al., 2021). Keamanan informasi sangat penting untuk menjaga keandalan dan kepercayaan layanan publik. Etika digital mendorong keterlibatan aktif dan daya tanggap layanan publik terhadap



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tuntutan masyarakat (Amirulkamar et al., 2023). Melalui penggunaan teknologi komunikasi, badan-badan publik dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan, komentar, dan keluhan dengan cepat dan efisien. Penerapan teknologi yang bijaksana dalam pelayanan publik diperlukan untuk menghindari prasangka dan ketidakadilan. Algoritma dan kecerdasan buatan harus dikembangkan dengan langkah-langkah untuk mencegah agar keputusan tidak dipengaruhi oleh variabel yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau prasangka.

Inovasi pelayanan publik di Era digital, Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0., era di mana disrupsi teknologi digital semakin pasif. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah istilah yang secara umum digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi (Effendi & Dewi, 2021). Birokasi harus mempunyai jiwa melayani, menuju ke arah yang lebih fleksibel dan dialogis serta menuju cara-cara kerja yang lebih realistis pragmatis, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terdapat beberapa alasan, mengapa penyelenggara layanan harus berinovasi. Pertama, sudah begitu banyak regulasi yang mengatur. Antara lain UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dll. Sehingga sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan inovasi. Adapun beberapa manfaat untuk inovasi pelayanan publik digital, pertama, mudah dan merata. Pelayanan publik semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. Kedua, sesuai kebutuhan layanan, maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespons sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan. Ketiga, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Keempat, efisien, cepat, berbiaya murah (*low cost*).

Etika digital layanan publik bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan teknologi informasi selaras dengan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tujuan sosial. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, layanan publik dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan standar etika dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Literasi digital merupakan kemampuan dan penguasaan seseorang dalam menggunakan media digital secara efisien, yang meliputi alat komunikasi dan jaringan internet. Kemahiran dalam literasi digital adalah kemampuan untuk mencari dengan cermat, cerdas, teliti, dan tepat, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Apabila tidak ada penerapan etika digital, maka akan terjadi penyebaran informasi yang tidak benar dan terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian di ranah digital. Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting bagi setiap pengguna internet untuk memahami dan menerapkan norma-norma etika ketika berpartisipasi dalam percakapan online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan literasi digital dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang dalam memanfaatkan dan mengakses teknologi. Kemahiran dalam informasi dan komunikasi terkait erat dengan literasi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks sosial dengan cara mendalam. Metode penelitian kualitatif menekankan interpretasi dan pemahaman makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu pengalaman atau kejadian (Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, 2022). Sumber data diperoleh melalui berita online, regulasi, jurnal, website resmi, dan media sosial. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis konten. Teknik analisis konten adalah suatu pendekatan sistematis untuk memahami isi dari dokumen atau materi lainnya. Tujuan dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang mungkin muncul dari data tersebut.

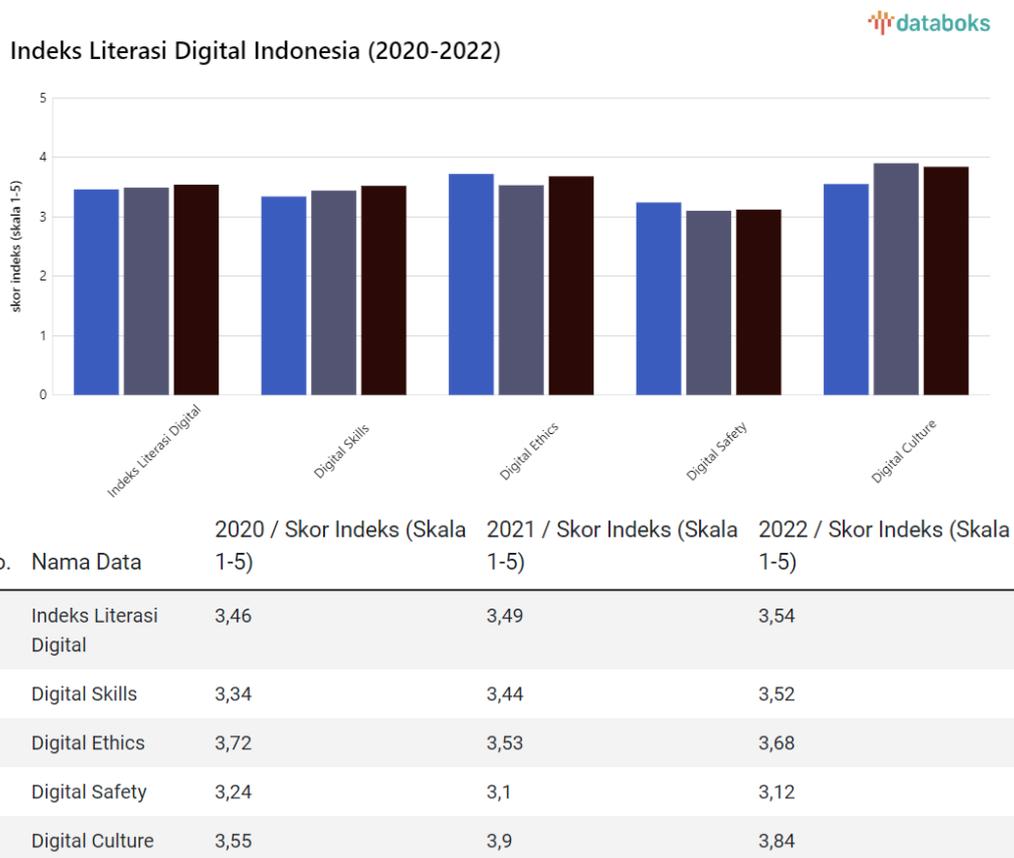
Hasil dan Pembahasan

Indikator literasi digital dalam pelayanan publik



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kerangka kerja pengembangan kurikulum literasi digital terdiri dari empat pilar: keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Keterampilan digital mengacu pada kemahiran seseorang dalam memahami, memanfaatkan, dan mengoperasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi TIK dalam kegiatan sehari-hari. Etika digital merujuk pada kemampuan manusia untuk memahami, mencontoh, mengadaptasi, menjustifikasi, menyengaja, dan membudayakan tata kelola perilaku etis di ranah digital dalam kesehariannya (Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, 2021). Keamanan digital mengacu pada kapasitas individu untuk mengidentifikasi, menerapkan, mengevaluasi, mempertimbangkan, dan meningkatkan pemahaman mereka dalam menjaga informasi pribadi dan memastikan keamanan digital dalam kegiatan sehari-hari. Budaya digital mengacu pada kapasitas individu untuk memahami, memaknai, mengenal, mencermati, dan membudayakan pemahaman kebangsaan, cita-cita Pancasila, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, serta proses digitalisasi budaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).



Gambar 1. Grafik Indeks Literasi Digital Di Indonesia, (Sumber Katadata,2023)

Penelitian ini menunjukkan bahwa skor literasi digital Indonesia pada tahun 2022 adalah 3,54 dari 5. Secara keseluruhan, tingkat literasi digital penduduk Indonesia diklasifikasikan sebagai "sedang". Indeks ini naik 0,05 poin dibandingkan dengan tingkat tahun 2021, yang tetap di angka 3,49. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,08 poin, melampaui nilai yang diamati pada tahun 2020. Penelitian ini mengukur indeks literasi digital dengan menggunakan empat pilar indikator utama: Keterampilan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital. Di bawah ini adalah rincian indikator dan perubahan skornya: Tingkat indikator keterampilan digital atau kompetensi digital naik dari 3,44 poin pada tahun 2021 menjadi 3,52 poin pada tahun 2022. Pilar ini menilai kemahiran pengguna internet dalam penggunaan komputer, mengunggah dan mengunduh data,



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

memverifikasi informasi yang diperoleh dari internet, dan tugas-tugas serupa. Skor untuk etika digital naik dari 3,53 poin di tahun sebelumnya menjadi 3,68 poin di tahun 2022. Metrik ini mengukur daya tanggap pengguna internet terkait pengunggahan konten yang tidak sah, memposting komentar yang menyinggung di media sosial, mematuhi norma-norma privasi di platform media sosial, dan perilaku serupa. Metrik untuk keamanan digital atau digital security meningkat dari 3,10 menjadi 3,12 poin. Indikator ini menilai kapabilitas pengguna internet dalam mengenali dan menghilangkan spam, malware, dan virus di komputer atau perangkat mereka sendiri. Indeks ini juga mengevaluasi praktik mereka dalam mencadangkan data dan menjaga informasi pribadi. Skor untuk indikator budaya digital atau digital culture menurun dari 3,9 poin menjadi 3,84 poin pada tahun 2022. Pilar ini menilai perilaku pengguna internet, seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli ketika mengunggah ulang, mempertimbangkan sensitivitas pembaca dari beragam etnis/agama/pandangan politik, mengapresiasi dan menyebarluaskan konten seni budaya Indonesia di ranah digital, dan lainnya. Penelitian ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komunitas Internet Indonesia (KIC). Penelitian ini melibatkan 10.000 pengguna internet berusia 13 hingga 70 tahun, yang berada di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Jajak pendapat dilakukan pada bulan Agustus dan September 2022 melalui wawancara tatap muka. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error yang dapat diterima sekitar 0,98% dan tingkat kepercayaan 95% (katadata,2023).

Dampak Literasi Digital Dalam Pelayanan Publik Dalam Perspektif Etika

Pemanfaatan literasi digital dalam pelayanan publik membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, dan melihatnya dari perspektif etika memberikan landasan penting untuk memahami konsekuensi moral dan nilai-nilai yang terlibat dalam implementasi literasi digital. Dampak literasi digital dapat tercermin dalam berbagai indikator yang menunjukkan tingkat pemahaman, keterampilan, dan partisipasi individu atau masyarakat dalam lingkungan digital (Trena et al., 2023). Peningkatan jumlah dan aksesibilitas perangkat digital, seperti komputer, tablet, atau smartphone menjadi salah satu faktor pendukung dalam literasi digital, dikarenakan masyarakat dapat menggunakan perangkat digital tersebut sebagai alat literasi dalam digitalisasi pelayanan publik.

Keahlian dalam menjelajahi internet dan menemukan informasi merupakan keterampilan yang dikenal sebagai literasi informasi atau literasi digital. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengakses, menilai, menyaring, dan menggunakan informasi secara efektif. Keahlian ini mencakup beberapa aspek yang membantu individu dalam memahami, menganalisis, dan mengelola informasi yang ditemui di lingkungan digital. Menjelajahi internet dan menemukan informasi menjadi semakin penting dalam era digital ini, di mana akses terhadap informasi sangat luas. Literasi informasi memainkan peran kunci dalam membantu individu beroperasi dengan efektif dalam lingkungan digital yang kaya informasi.

Dalam perspektif Etika memahami bahwa penerapan teknologi tidak menciptakan kesenjangan dalam penggunaan digital, dan semua warga memiliki akses yang setara terhadap layanan digital. Etika memerlukan keadilan dan inklusivitas dalam menyediakan layanan publik secara online. Pelayanan publik dapat diakses melalui digital dengan pengetahuan masyarakat. Literasi digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara online, membantu dalam efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Beberapa contoh pelayanan publik yang dapat ditingkatkan melalui literasi digital meliputi: Pendaftaran pelayanan kesehatan online dalam hal ini masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online untuk layanan kesehatan, membuat janji temu dengan dokter, dan mengakses rekam medis elektronik mereka. Kemudian dari bidang pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara online, membantu orang tua atau peserta pelatihan untuk mengakses informasi dan mengisi formulir tanpa harus pergi langsung ke lembaga pendidikan. Ketiga proses pengajuan izin dan lisensi, seperti perizinan usaha atau izin mengemudi, dapat dilakukan secara online, meminimalkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keempat pendaftaran keanggotaan dalam program sosial atau keanggotaan perpustakaan dapat dilakukan melalui platform online, memudahkan akses dan administrasi. Kelima pembayaran pajak dan tagihan dalam hal ini warga dapat membayar pajak, tagihan utilitas, atau biaya pelayanan publik lainnya secara online, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor pelayanan pajak atau utilitas. Selanjutnya laporan dan pengaduan online masyarakat dapat melaporkan insiden atau membuat pengaduan melalui platform online, seperti pelaporan kejahatan, kondisi jalan rusak, atau permasalahan lingkungan. Melalui portal online, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan, edukasi, dan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kesehatan atau edukasi tertentu.

Peningkatan literasi digital membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam menggunakan layanan-layanan tersebut secara online. Ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, meningkatkan transparansi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa literasi digital diintegrasikan dengan baik dalam desain dan implementasi layanan publik online agar dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang.

Literasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik jika di tinjau dari perspektif etika peningkatan kualitas layanan harus diiringi dengan kebijakan etika yang memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Perspektif etika dalam peningkatan kualitas layanan adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Adopsi kebijakan etika menjadi kunci untuk menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap langkah yang diambil.

Peningkatan kualitas layanan harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa layanan disediakan dengan adil dan setiap warga memiliki akses yang setara. Kebijakan etika harus menekankan pada penghapusan ketidaksetaraan dalam pelayanan dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi yang tidak adil dalam penyediaan layanan.

Pada sesi talkshow, Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto turut menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital guna meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia. Program Gerakan Nasional Literasi Digital menasar pada tiga segmen, yaitu segmen pemerintahan, segmen pendidikan, dan segmen masyarakat umum. Program tersebut memiliki target 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi sampai dengan tahun 2024. "Pelatihan dilakukan secara masif kepada 514 kabupaten/kota di 34 provinsi setiap tahunnya. Dalam mencapai target tentunya perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak," tutur Boni. Pada akhir pemaparannya, ia mengatakan pada tahun 2023 akan ada kajian terkait konten literasi digital yang diperlukan untuk membangun ruang digital yang lebih positif dan menambah agenda yaitu Sekolah Influencer (Kominfo, 2023).

Akuntabilitas dan transparansi dalam menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat dan mewujudkan kebijakan etika dalam setiap langkah peningkatan kualitas layanan, termasuk pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan.

Dalam literasi digital melalui pelayanan publik juga sangat menekan Perspektif etika memandang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga kebebasan individu dalam mengakses dan menggunakan layanan publik. Kebijakan etika harus mencakup garis panduan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga kebebasan individu dalam lingkungan digital (Arifah, 2020). Memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk peningkatan kualitas layanan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas layanan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mengalami peningkatan dimulai sejak pandemi hingga saat ini oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari laporan hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dalam laporannya indeks literasi digital Indonesia pada tahun 2022 berjumlah 3,54 poin dari skala 1-5. Ini mendeskripsikan bahwa tingkat literasi digital masyarakat di Indonesia berada di level “sedang”. Indeks tersebut meningkat 0,05 poin dibanding 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada 2020, angkanya naik 0,08 poin. Adapun indeks literasi digital dalam laporan ini diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni *Digital Skills*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*. Berikut rincian indikator dan pergerakan skornya:

Dari 3,44 poin di tahun 2021 menjadi 3,52 poin di tahun 2022, keterampilan digital meningkat. Indikator ini memeriksa seberapa baik pengguna internet dapat menggunakan komputer atau perangkat lain, mengirim dan menerima data, memeriksa informasi yang mereka dapatkan dari internet, dan hal-hal lainnya. Selain itu, etika digital juga meningkat dari 3,53 poin di tahun sebelumnya menjadi 3,68 poin di tahun 2022 terhadap pengguna internet dalam hal-hal seperti memposting konten tanpa izin, bersikap kasar di media sosial, menghormati privasi di media sosial, dan sebagainya. Tanda-tanda keselamatan atau keamanan digital naik dari 3,10 poin menjadi 3,12. Indikator ini melihat hal-hal seperti seberapa baik pengguna internet dapat menemukan dan menyingkirkan spam, malware, dan virus di komputer atau perangkat lain, seberapa sering mereka mencadangkan data mereka, seberapa aman data pribadi mereka, dan hal-hal lainnya. Pada tahun 2022, skor untuk ukuran budaya digital atau budaya digital turun dari 3,9 poin menjadi 3,84 poin.

Indikator ini mengkaji perilaku pengguna internet, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengunggah ulang konten dengan mencantumkan nama penulis atau pengunggah asli, mengunggah konten yang mempertimbangkan perasaan pembaca yang berbeda ras, agama, dan pandangan politik, serta menikmati dan berbagi konten terkait seni budaya Indonesia secara daring, dan perilaku lainnya. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital untuk mengakses dan mengelola informasi disebut sebagai kecakapan keterampilan digital. Memiliki kemampuan untuk menyadari, mempertimbangkan, dan membangun tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang etika digital. Kapasitas pengguna untuk mengenali, memikirkan, menerapkan, menganalisis, memeriksa, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang keamanan digital. Kemampuan individu untuk membaca, menerjemahkan, mengenal, menyelidiki, dan membangun wawasan kebangsaan, serta cita-cita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang budaya digital. Salah satu dampak positif dari literasi digital adalah dapat membantu dalam proses pembelajaran dengan memungkinkan individu untuk mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang akurat, signifikan, dan berpotensi memberikan manfaat. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang bagi para pendidik dan pengajar untuk lebih produktif dalam menciptakan media pembelajaran digital. Hal ini akan memastikan bahwa mereka tidak mudah disesatkan oleh sarana digital, seperti menjadi mangsa informasi palsu.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif etika memahami bahwa penerapan teknologi tidak menciptakan kesenjangan dalam penggunaan digital, dan semua warga memiliki akses yang setara terhadap layanan digital. Etika memerlukan keadilan dan inklusivitas dalam menyediakan layanan publik secara online. Pelayanan publik dapat di akses melalui digital dengan pengetahuan masyarakat. Literasi digital dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara online, membantu dalam efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Beberapa contoh pelayanan publik yang dapat ditingkatkan melalui literasi digital meliputi: Pendaftaran pelayanan kesehatan online dalam hal ini masyarakat dapat mendaftarkan diri secara online untuk layanan kesehatan, membuat janji temu dengan dokter, dan mengakses rekam medis elektronik mereka. Kemudian dari bidang pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara online, membantu orang tua atau peserta pelatihan untuk mengakses informasi dan mengisi formulir tanpa harus pergi langsung ke lembaga



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pendidikan. Ketiga proses pengajuan izin dan lisensi, seperti perizinan usaha atau izin mengemudi, dapat dilakukan secara online, meminimalkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi.

Daftar Pustaka

- A.Yudo Triartanto, A. D. S. (2019). Literasi digital melalui aplikasi Microsoft Access sebagai komunikasi bisnis terhadap perubahan perilaku konsumen (Studi pada warga Jatikramat, Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdimas BSI*, 2(1), 166–173. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/abdimas/article/view/5034>
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. *Governance*, 1(1), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33470%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/33470/31669>
- Amirulkamar, S., Ulfa, K., Zalikha, S. N., Mulya, S. M., Hidayati, U., & Yana, S. Z. (2023). *Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia*. 12(3), 564–574.
- Arifah, U. (2020). Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 4(2), 30–41. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245>
- Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, M. . (2021). Implementasi Sustainable Development di Indonesia. In *Pustaka Ramadhan*.
- Effendi, F. P., & Dewi, D. A. (2021). Generasi Milenial Berpancasila di Media Sosial. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 116–124. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1051>
- Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, A. Y. K. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 254–263. <https://stia-binaruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/338>
- Kominfo. (2023). Indeks Literasi Digital Indonesia. *Kominfo*, 2024.
- Mardhiyani, N. L. (2020). Tourism 4.0: Strategi komunikasi pemasaran pariwisata kota semarang. *Jurnal Kajian Media*, 4(1), 40–52. <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2384>
- Sularsih, H., & Wibisono, S. H. (2021). Literasi Keuangan, Teknologi Sistem Informasi, Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2028. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p12>
- Trena, P. W., Rivani, R., Nirmalasari, H., Becti, Z. M. B., Sukmadewi, R., & Novel, N. J. A. (2023). Digitalisasi Melalui Media Sosial Sebagai Strategi Umkm Kabupaten Purwakarta Pada Era New Normal. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 303. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.41733>
- Wahono, H. T. T., & Effrisanti, Y. (2018). Literasi Digital di Era Millennial. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran STKIP PGRI Jombang*, 185–193.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.